

# HUBUNGAN NASIONALISME DAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA: aK ar SoSio-hiStoriS, ortodoKSi, dan PRAKSISNyA

Oleh: Retor AW Kaligis

## ABSTRAK

*Makalah ini membahas mengenai peran nasionalisme dan keadilan sosial di Indonesia dalam menghadapi eksploitasi di sektor ekonomi. Makalah ini berkonsentrasi membahas cara meningkatkan peranan masyarakat untuk bekerjasama dalam menciptakan keadilan social.*

## ABSTRACT

*This paper investigates the role of nationalism and social justice in Indonesia in facing foreign exploitation on economy sector. This paper concentrates on empowering people to work together in achieving social justice.*

## 1. LATAR BELAKANG

Nasionalisme di Indonesia pernah berhasil mendapatkan loyalitas dan pengorbanan besar dari rakyat. Pada saat Perang Kemerdekaan 1945-1949, rakyat rela berkorban harta benda dan bahkan nyawa demi keyakinan untuk memiliki negara dan pemerintahan sendiri.

Namun, nasionalisme di negeri bekas jajahan tidak hanya berbeda dengan nasionalisme di negara-negara Barat. Di antara sesama bekas jajahan sendiri terdapat perbedaan karakteristiknya. Meski ekspansi kolonial Eropa pasca *renaissance* memiliki pola tertentu, yakni berkaitan dengan sistem pertukaran ekonomi dari kapitalisme modern, di mana daerah-daerah jajahan merupakan ekonomi-ekonomi satelit yang menghasilkan pertukaran yang tidak adil dan tidak seimbang, terdapat perbedaan cara kolonialisme yang tergantung pada basis material penjajah serta kondisi kemasyarakatan dan kultural negeri jajahan.

Belanda memiliki industri yang kurang maju dan menjajah untuk mencari bahan mentah. Karena itu, kekayaan alam dieksploitasi dan rakyat Indo-

nesia diperas. Pada umumnya, sekolah-sekolah modern barat baru didirikan seiring dengan dimulainya liberalisasi ekonomi sejak paruh kedua abad ke 19 dalam rangka mengisi tenaga di pemerintahan dan lapangan swasta. Kesempatan memperoleh pendidikan lebih tinggi hanya diperuntukkan bagi anggota masyarakat dari strata tertentu: keluarga priyayi dan pedagang luar Jawa<sup>1</sup>. Dari kalangan terdidik tersebut, nasionalisme sebagai ideologi yang bersumber dari dunia Barat masuk dan berkembang. Kondisi masyarakat kolonial di Hindia Belanda tidak memunculkan kelas menengah kuat yang memerlukan kesatuan kekuatan dengan seluruh rakyat, sehingga melahirkan gerakan nasionalisme yang diarahkan untuk mengangkat derajat rakyat kecil.

Hal ini berbeda dengan keadaan masyarakat di India yang dijajah Inggris sebagai pasar karena overproduksi di negeri induk. Imperialisme dagang Inggris menjual berbagai barang ke India, seperti

1. Di tahun 1900, pendapatan bumiputera per kepala setahun sekitar 63 gulden, sedang golongan Eropa 2.100 gulden, dan Timur Asing sekitar 250 gulden. Pada tahun itu hanya 3 orang dari setiap 1.000 penduduk bumiputera yang bersekolah. Dari sekitar 100.000 bumiputera yang bersekolah, hanya 13 orang yang duduk di sekolah menengah (HB). Lihat Simbolon, Parakriti T. Menjadi Indonesia: Akar-Akar Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Kompas-Grasindo, 1995, h. 222.

gunting, pisau, pakaian, sepeda, hingga mesin jahit. Karena itu sejak awal imperialisme Inggris sudah membuka sekolah dan universitas agar rakyat India punya kemauan dan kemampuan membeli. Implikasinya, corak perjuangan bangsa India untuk melawan kolonial Inggris tak terlepas dari kepentingan kelas borjuasi. Kalangan pengusaha India merasa tersaingi dengan kehadiran kolonial Inggris, sehingga tampil para tokoh pergerakan dari kalangan pengusaha seperti Nehru, Tata, dan Birla. Salah satu semboyan untuk melawan imperialisme Inggris adalah swadesi (gerakan yang menganjurkan agar menggunakan barang-barang buatan bangsa sendiri), yang merupakan kepentingan kaum pengusaha India dalam usaha memenangkan persaingan dagangnya<sup>2</sup>. Gerakan swadesi membuat imperialisme dagang Inggris menjadi lumpuh sehingga berperan besar bagi India untuk meraih kemerdekaannya tahun 1947.

Adapun di wilayah Indo Cina, tak lama setelah Perang Dunia Kedua, pada 29 Agustus 1945, bekas jajahan Perancis tersebut memproklamasikan kemerdekaannya melalui revolusi nasional mengusir penjajah asing sekaligus perjuangan kelas. Hal itu menyebabkan sebagian besar kaum borjuasi dan ningrat berpihak Perancis. Sisa dari perjuangan kelas itu masih terasa di Vietnam, Laos, dan Kamboja hingga penghujung abad ke-20, dengan adanya faksi-faksi Sihanouk, Son San, dan Kiu Sampan.

Berlainan dengan di Indocina, para pemimpin bangsa di Indonesia lebih mementingkan perjuangan nasional tanpa perjuangan kelas. Keanekaragaman masyarakat, baik horizontal maupun vertikal, menjadi realita yang berusaha diakomodir gerakan nasionalisme di Indonesia.

Untuk mengorganisir gerakan nasionalisme, sejak zaman kolonial para pemimpin gerakan nasionalis yang berasal dari kelas strata atas berpendidikan modern (barat) menyalurkannya melalui pembentukan organisasi-organisasi nasionalis. Sulit dibayangkan apakah Yogyakarta dapat menjadi kota perjuangan tanpa keterlibatan pihak kraton? Demikian halnya dengan kalangan pengusaha -yang memiliki jaringan sampai ke luar negeri seperti Singapura dan India- tentu tak mau membantu membiayai keuangan negara Indonesia melalui perdagangan gelap atau penyelundupan di tengah blokade tentara Belanda, jika diberlakukan perjuangan kelas. Bambu runcing menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap penjajahan.

2. Soekarno membandingkan imperialisme liberal dari Amerika Serikat, imperialisme semi liberal dari Inggris, imperialisme semi ortodoks dari Belanda, dan imperialisme ortodoks dari Spanyol dan Portugal. Imperialisme liberal terhadap rakyat yang dikolonisir itu liberal, ini boleh, itu boleh. Yang semi liberal itu setengah menindas setengah lapang dada. Yang semi ortodoks memberi jalan sedikit-sedikit untuk berpikir. Yang ortodoks itu sangat menindas kepada rakyat yang dikolonisir. Perbedaan cara kolonialisme itu, menurut Soekarno, karena adanya adanya perbedaan basis material dari penjajah itu. Misalnya, berbeda dengan Belanda yang memiliki industri kurang maju dan menjajah untuk mencari bahan baku (rempah-rempah), Inggris menjajah India memiliki tujuan untuk memperluas pasar sehingga Inggris berkepentingan untuk mempertahankan daya beli masyarakat India. Kelas menengah India dipertahankan pada saat itu. Lihat Sukarno. Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta: Inti Inday Press, 1984, h. 5-19.

Negeri ini mewarisi wilayah kolonial yang dihuni beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan dengan batas-batas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang tidak sama. Di tengah sistem ekonomi kapitalisme berkembang pada era kemerdekaan, masih ada komunitas yang hidup terpencil di pedalaman. Selain demokrasi modern yang tumbuh di negeri ini, terdapat pula berbagai kerajaan dan suku dengan berbagai hak tradisionalnya.

Semboyan bhinneka tunggal ika sesungguhnya masih merupakan suatu cita-cita yang harus diperjuangkan. Di masa Orde Baru, persatuan dan kesatuan dijaga melalui kebijakan anti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam tatanan politik yang sentralistik, sehingga tidak memupuk kemampuan masyarakat untuk hidup dalam perbedaan secara jernih, toleransi, dan damai. Hingga sekarang, hubungan antar golongan seringkali tidak berlangsung sinergis. Konflik sosial terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Maluku, dan Poso. Perbedaan pendapat kerap disikapi dengan reaktif serta membuat distingsi tajam “kami” dan “mereka”.

Kaum nasionalis seringkali mengedepankan persatuan bangsa dan menggaungkan isu kesejahteraan rakyat. Namun, seberapa solid kekuatannya mengatasi persoalan ketidakadilan sosial jika dihadapan dengan kepentingan akumulasi modal? Padahal isu keadilan sosial merupakan masalah sosial, menyangkut keberlanjutan bangunan keindonesiaan, yang harus diatasi kaum nasionalis agar warga negara umumnya merasa cocok untuk hidup didalamnya.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke penguasa bangsa sendiri belum mendorong bertumbuhnya keadilan sosial. Meski negeri Indonesia memiliki tanah-air yang luas dan kekayaan alam berlimpah, warisan sosial kolonialisme masih berlanjut dengan masih berlangsungnya ketimpangan penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Sejak masa kolonial, kemajuan teknologi juga sudah berkembang di Nusantara. HW Dick menjelaskan, pada tahun 1900 Jawa merupakan ekonomi yang paling terintegrasi dan modern secara teknologis antara Benggala dan Jepang. Teknologi revolusi industri telah diterapkan pada jaringan komunikasi dan transportasi, pabrik-pabrik raksasa berorientasi ekspor yang membutuhkan sebagian besar tanah terbaik di Pulau Jawa, sistem irigasi, pengerjaan logam, industri bermesin berat, produksi barang-barang konsumsi kelas menengah perkotaan, konstruksi bahan-bahan seperti batu bata dan kayu, serta fasilitas umum seperti gas dan listrik. Di luar Singapura dan Penang, di tempat-

tempat lain manapun di Asia Tenggara tidak ada hal semacam itu<sup>3</sup>. Di tengah modernisasi tersebut, rakyat bumiputera umumnya tetap berada dalam posisi subordinat yang mengalami pemiskinan dan pembedahan. Kepentingan kolonialisme membuat teknologi lebih digunakan untuk menunjang sarana eksploitasi sumber daya alam dan manusia.

Pada era kemerdekaan, kemajuan teknologi sebagaimana tercermin dari perkembangan industri manufaktur, pertambangan, dan sebagainya, juga tidak membuat Indonesia menjadi sejahtera. Negeri ini masih saja menjadi penjaja sumber daya alam dan sumber tenaga murah. Jika ekonomi kolonial memanfaatkan kekuasaan feodal sehingga operasinya menjangkau hingga ke desa, kini pemodal besar, yang banyak dikuasai asing, dengan didukung sejumlah elite bangsa sendiri terus mendominasi sumber-sumber ekonomi.

Pada era 1950-an elite nasionalis mulai terjun menjadi pengusaha nasional melalui fasilitas lisensi impor dan proteksi, adapun pembangunan ekonomi rakyat seperti koperasi bagi kaum tani kalah prioritas. Di satu sisi, cita-cita Soekarno sejak 1927 agar bangsa Indonesia mengurus diri sendiri (self-help) terwujud pada 1957 melalui nasionalisasi berbagai perusahaan asing. Di sisi lain, banyak hasil nasionalisasi dikuasai militer yang menjadi cikal bakalnya memasuki dunia bisnis.

Orde Baru menyuburkan kaum pemodal yang melakukan kegiatan besar-besaran di sektor perkebunan, pertambangan, industri, dan kehutanan. Banyak petani dan golongan adat kehilangan tanah. Peluang sektor informal perkotaan dibatasi melalui penggusuran tanpa prioritas pemberdayaannya. Rakyat kecil mengalami proletarisasi yang terjebak lingkaran kemiskinan. Hak-hak adat atas sumber daya ekonomi kian termarginalkan, sebagaimana tercermin dari segi penguasaan tanah oleh pemodal besar yang mengabaikan keberadaan tanah adat.

Sejak zaman kolonial, tanah-tanah komunal kian hilang di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Papua, Aceh, dan Riau yang terus diambil kekayaan alam pertambangannya, banyak anggota masyarakatnya berkubang dalam kemiskinan. Di Kalimantan, hak penguasaan hutan (HPH), izin perkebunan, dan kuasa pertambangan diberikan ke sejumlah pengusaha lokal dan asing tanpa mempertimbangkan hak-hak adat yang ada di masyarakat lokal.

Di era reformasi bangsa ini semakin menjajakan kekayaan alamnya ke pihak asing, aset negara dijual, dan tetap menjadikan penduduknya sebagai sumber tenaga murah. Indonesia belum dapat mengonsolidasi diri untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang berpihak rakyat kecil. Per-

3. Lihat tulisan HW Dick, dosen sejarah ekonomi di Melbourne University, berjudul "Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an" dalam Lindblad, J. Thomas (ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002, h. 37.

soalan penguasaan sumber-sumber ekonomi yang berkeadilan sosial dan penyaluran aspirasi berbagai komponen masyarakat kurang mampu diperjuangkan organisasi kaum nasionalis yang menyatakan pengakuan akan kebhinnekaan. Secara sosiologis, hal ini menyebabkan terputusnya hubungan kaum nasionalis dan organisasi nasionalis dengan rakyat kecil.

Dari perbandingan ideologi dan praktik nasionalisme terlihat adanya problem relasi kekuasaan antara kaum nasionalis dengan rakyat, sehingga pertarungan meraih kekuasaan politik hanya merupakan rotasi aktor hegemoni politik dan ekonomi. Rakyat kecil, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh di berbagai daerah terus mengalami marginalisasi ekonomi.

### 3. PERUMUSAN MASALAH

Dari persoalan ini, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana proses pembentukan ideologi nasionalisme, akar sosio-historis, ortodoksi, dan aktualisasinya di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi (1945-2010) di tengah kondisi pascakolonial?

### 4. TUJUAN PENELITIAN

Terdapat dua tujuan penelitian ini:

- Menganalisis proses pembentukan ideologi nasionalisme, akar sosio-historis, ortodoksi, dan aktualisasinya di Indonesia di tengah kondisi pascakolonial.
- Menemukan kesimpulan teoritik dari gambaran partikular ideologi dan praktik nasionalisme dalam masyarakat majemuk di tengah kondisi pascakolonial.

### 5. METODOLOGI PENELITIAN

#### 5.1. PENDEKATAN

Penelitian sosial merupakan usaha menjelaskan dan memahami realitas sosial secara sistematis dengan fakta-fakta empiris dan kerangka teori yang ada. Hal tersebut memiliki konsekuensi pada metode yang digunakan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan bukti yang sedang dicari dalam rangka menjelaskan makna yang berlaku pada situasi dan kondisi yang sedang dipelajari.

#### 5.2. TEKNIK PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud melakukan perbandingan secara konseptual ideologi dan praktik nasionalisme di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi. Untuk memperbandingkan fenom-

ena pada masa yang berbeda tersebut digunakan historical-comparative research sebagai teknik untuk melihat perbandingan fenomena pada kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini sejarah dilihat dari tiga aspek. Pertama, sejarah sebagai sumber data (teks dan fakta historis). Kedua, sejarah sebagai perspektif, di mana teks dikaitkan dengan konteks sosial tertentu, semangat zaman yang ada saat itu. Ketiga, sejarah sebagai analisis, yakni cara bagaimana mengungkap konteks dan dibandingkan dengan fakta lainnya.

### 5.3. PENGUMPULAN, ANALISA DAN PENYAJIAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka, berupa dokumen, artikel, buku, dan sumber tertulis lainnya. Analisa data dilakukan dengan cara melakukan interpretasi sosial, kultural, dan politik yaitu pengolahan dan pemahaman peneliti terhadap persoalan yang diteliti. Pada tahap penyajian data, disajikan hasil analisis tentang ideologi dan praktik nasionalisme di Indonesia.

## 6. KERANGKA TEORITIS

### 6.1. NASIONALISME DAN DEMOKRASI

Revolusi Perancis abad ke 18 menempatkan “bangsa” pada posisi penting. Pada 1789 Majelis Nasional Perancis dalam klausul III Declaration of the Rights of Man menyatakan:

“Bangsa pada dasarnya merupakan sumber utama semua kekuasaan; seorang individu, atau sekelompok orang, tidak memiliki hak untuk memegang kekuasaan yang secara jelas tidak berasal dari bangsa.”<sup>4</sup>

Klausul itu meletakkan fondasi teori nasionalisme, sehingga revolusi Perancis dianggap sebagai tonggak nasionalisme modern. Ian Adams mengatakan:

“Dari semua ideologi modern, nasionalisme jelas merupakan produk Revolusi Perancis. Memang benar demikian, meskipun ada fakta bahwa arti identitas nasional dan loyalitas pada bangsa dapat ditemukan hingga zaman kuno, sementara negara bangsa baru muncul beberapa ratus tahun lalu. Apa yang dilakukan Revolusi Perancis adalah menggabungkan semua yang lebih tua ini dengan sebuah gagasan tentang ‘bangsa’ sebagai sumber legitimasi dan otoritas puncak. Ini bertentangan dengan gagasan tradisional yang disucikan oleh agama tentang klaim-klaim dinasti pangeran untuk memerintah atas suatu wilayah yang telah mereka warisi, tanpa memandang keinginan rakyat yang hidup di dalamnya... Adalah bangsa yang berkuasa dan bukan Raja; adalah bangsa yang secara politik meru-

upakan unit penting, bukan kaum bangsawan.”<sup>5</sup>

Namun perjalanan Revolusi Perancis melenceng dari tujuan karena rakyat hanya memperoleh kebebasan (liberté), sedangkan persamaan (égalité) dan persaudaraan (fraternité) cuma menjadi slogan. Feodalisme diganti borjuisme, yakni kekuasaan politik yang didominasi kepentingan lapisan sosial-ekonomi atas. Borjuasi modern yang timbul dari runtuhnya masyarakat feodal berkepentingan dalam pembentukan negara-bangsa sebagai “benteng pertahanannya”.

Meski rakyat diberi hak dalam pemilihan, kaum buruh, petani, dan si miskin lainnya senantiasa tidak dapat mempertahankan calon-calonnya dalam pemilihan parlemen. Aspirasi mereka terkepung pengaruh pikiran borjuis yang berkembang di masyarakat, dan terlebih lagi mereka kekurangan alat-alat propaganda. Kondisi ini memicu kecacauan di Perancis sehingga melahirkan kediktatoran Napoleon Bonaparte.

Benedict Anderson mengemukakan pengalaman sejarah nasionalisme di Eropa Barat, Amerika, dan Rusia telah menyediakan seperangkat bentuk aturan standar bagi nasionalisme yang mana sesudahnya kaum elit nasionalis di Asia dan Afrika memilih salah satu diantaranya. Karenanya, nasionalisme memerlukan teknologi baru dan bentuk baru dari organisasi untuk memberikan pengaruhnya.<sup>6</sup>

Memang, sebagaimana pendirian Anderson, terdapat keuniversalan gagasan dari Barat, termasuk ide tentang nasionalisme modern dan penyebarannya, yang lalu diadopsi kaum elite nasionalis di Asia dan Afrika. Akan tetapi, para pendiri bangsa, terutama Soekarno dan Mohammad Hatta, melihat gagasan nasionalisme dari Barat tidak dapat begitu saja dijadikan sebagai modul untuk membangun Indonesia yang bersatu dan merdeka. Kemerdekaan yang dicita-citakan merupakan kemerdekaan bangsa sekaligus kemerdekaan rakyat, sebagai usaha bersama merombak struktur sosial yang menyebabkan rakyat terdesak dari sumber kehidupannya berupa alam subur dan kaya, sehingga dapat tercapai persamaan dan menumbuhkan persaudaraan sesama anak bangsa.

Pada koran Fikiran Ra'jat tahun 1932 Soekarno menyatakan, “Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme Marhaen, dan menolak tiap tindak burd-

5. *Ibid.*, h. 120-1.

6. Ia mengambil contoh penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad 16 membangun landasan bagi kesadaran nasional di Eropa dengan menciptakan bahasa kekuasaan yang jenisnya berlainan dengan bahasa-bahasa ibu yang dipakai dalam urusan-urusan administratif sebelumnya. Teknologi mesin cetak mendorong berkembangnya bahasa nasional sebagai sarana komunikasi antar anggota bangsa, sehingga komunitas yang besar itu saling mengenal satu sama lain sebagai satu bangsa. Struktur dasar dua bentuk pembayangan yang pertama berkembang di Eropa di abad delapan belas: novel dan surat kabar, merupakan bentuk wahana yang menyediakan cara-cara teknis “mewujudkan” jenis komunitas terbayang yang adalah suatu bangsa. Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991, Bab 3: *The Origins of National Consciousness*, Chapter 6: *Official Nationalism and Imperialism*, and Bab 7: *The Last Wave*. Dalam *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*. London: Verso, 1998, h. 29. Anderson juga menjelaskan “... derivative discourse”, and ‘imitation’ in understanding the remarkable planetary spread, not merely of nationalism, but of a profoundly standardized conception of politics, in part by reflecting on the everyday practices, rooted in industrial material civilization, that have displaced the cosmos to make way for the world.”

4. Lihat Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Qalam, 2004, h. 122.

juisse yang menjadi sebabnya kepintjangan masyarakat itu.”<sup>7</sup>

Adapun Hatta menyebutkan, “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada.”<sup>8</sup>

Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai komunitas politis yang terbayang (*imagined political community*). Bangsa merupakan sesuatu yang “dibayangkan” karena para anggotanya tidak tahu, kenal, bertemu, atau mendengar sebagian anggota lain, tapi pada benak mereka hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Baginya, bangsa “dibayangkan” sebagai komunitas tanpa memperdulikan adanya ketidakadilan dan eksploitasi yang mungkin tidak terhapuskan pada setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu mengandung kesetiakawanan horisontal yang mendalam dan meluas.<sup>9</sup>

Pengertian Anderson tentang bangsa sebagai *imagine community* lebih menekankan bangsa dari segi kognisi dengan mengabaikan persoalan distribusi penguasaan sumber-sumber ekonomi yang membuat “bayangan tentang kebersamaan” dapat berbeda pemaknaannya di antara komponen bangsa.

Padahal hubungan bangsa dan usaha mengatasi persoalan distribusi penguasaan sumber-sumber ekonomi mempengaruhi sejauhmana kekokohan persatuan bangsa dan berkembangnya gagasan nasionalisme, apalagi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dengan demikian, bangsa seharusnya dipahami sebagai fenomena sosio-makro politik tentang keinginan dan gambaran tentang kebersamaan berdasarkan alasan sosio-historis tertentu yang dapat bertahan dan berkembang karena dipengaruhi harapan akan keadilan sosial.

## 6.2. KONDISI PASCAKOLONIAL DAN IDEOLOGI EKSPLOITATIF

Secara konseptual, nasionalisme Indonesia bersifat eklektis yang khas setempat dan adanya keuniversalan gagasan dari barat tentang kedaulatan bangsa. Sebagai bekas jajahan, Indonesia menghadapi kondisi pascakolonial yang berpengaruh pada usaha menegakkan keadilan sosial. Ania Loomba menjelaskan, “Colonialism’ is not just something that happens with the collusion of forces inside, but a version of it can be duplicated from within”.<sup>10</sup>

Di Indonesia, kondisi pascakolonial berkaitan

adanya pelestarian eksploitasi sumber daya ekonomi dan penempatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja murah di negeri yang luas dan kaya raya ini. Kekayaan alam diambil dengan pembagian hasil yang lebih menguntungkan kepentingan pemodal besar dan menempatkan rakyat pada posisi lemah. Upah tenaga kerja yang murah menjadi faktor penarik agar para perusahaan transnasional berminat berinvestasi, tanpa adanya upaya sistematis untuk meningkatkan keahlian dan produktivitas buruh, serta lompatan strategi industrialisasi.

Fenomena kekuasaan berada di dalam struktur politik di mana terdapat aspek-aspek konflik dan integrasi di dalamnya. Maurice Duverger mengatakan, struktur politik dapat dibagi menjadi dua klasifikasi besar: struktur fisik dan struktur sosial. Istilah “fisik” dipakai di sini bagi unsur yang paling dekat dengan alam (geografi dan demografi). Fenomena kekuasaan dekat tautannya dengan dan sangatlah besar dipengaruhi oleh struktur fisik di mana mereka ada, apakah kita berbicara tentang antagonisme yang tujuannya adalah memperoleh kekuasaan, atau integrasi yaitu sesuatu yang sedang diusahakan untuk dicapai oleh mereka yang berada dalam kekuasaan. Dengan perkembangan internasional dan industrialisasi, masalah sumber-sumber alam (bahan mentah) menjadi genting. Sedangkan struktur sosial mengacu pada faktor-faktor yang lebih artifisial, dan yang secara hakiki manusiawi, dibagi menjadi: keterampilan teknologis; lembaga-lembaga; serta doktrin dan kebudayaan. Meski membedakan struktur politik menjadi struktur fisik dan struktur sosial, Duverger berpendapat tidak ada garis tajam yang memisahkan kedua struktur itu. Manusia tidak menanggapi struktur fisik di dalam bentuk-bentuknya yang asli, material, akan tetapi melalui ide-ide, keyakinan, dan tradisi-tradisi sosial yang diperoleh, misalnya manipulasi manusia atas tanah, benda-benda yang diolah, dan pembatasan kelahiran. Sebaliknya, hampir semua lembaga sosial sesuai dengan faktor fisik tertentu. Misalnya tujuan lembaga-lembaga ekonomi adalah untuk memuaskan kebutuhan material; cara dengan mana kebutuhan material ini dipenuhi menentukan banyak unsur kebudayaan.<sup>11</sup>

Dalam kajiannya, Duverger memandang perubahan kehidupan politik ditentukan terutama oleh faktor teknologi dan lembaga sosial-ekonomi. Kemajuan teknologi mendorong pembangunan ekonomi dan merombak kebudayaan suatu bangsa.

7. Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid Pertama)*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.

8. Lihat pidato Hatta berjudul “Lampau dan Datang” dalam Hatta, Mohammad. *Karya Lengkap Bung Hatta (Buku 2): Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2000.

9. Anderson menolak pendapat Seton-Watson yang menganggap bangsa mengada ketika sejumlah orang dalam jumlah cukup besar di suatu masyarakat menganggap diri membentuk suatu bangsa atau berperilaku seolah-olah mereka sudah membentuk sebuah bangsa. Frase “menganggap diri mereka” seharusnya diubah menjadi “membayangkan diri mereka”. Lihat Anderson, Benedict. *Imagined Communities*: op.cit., h. 6-7.

10. Loomba, Ania. *Colonialism/Postcolonialism*, London: Routledge, 1998, h. 12.

11. Dari segi struktur fisik, dalam kaitan teritorial dan populasi, terdapat persoalan tekanan penduduk dimana besarnya jumlah penduduk dalam satu wilayah dapat menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Adapula komposisi penduduk dapat dilihat dari segi umur, seks, tingkat sosio-kultural (dari segi pendidikan dan keahlian), emis, dan distribusi geografis yang mempengaruhi kehidupan politik. Dari segi struktur sosial, keterampilan teknologis adalah cara-cara yang dipergunakan manusia untuk mengolah benda-benda, alat-alat, mesin, dan seterusnya. Lembaga-lembaga adalah alat mempertahankan ketertiban hubungan sosial yang mapan (stabil) –status hukum keluarga, undang-undang yang mengatur barang-barang dan milik, serta konstitusi politik. Adapun doktrin dan kebudayaan adalah ideologi, keyakinan, dan ide-ide kolektif yang pada umumnya dianut di dalam suatu komunitas tertentu. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000, tentang struktur fisik h. 31-77 dan struktur sosial h. 78-155.

Perbedaan antara negara maju dan negara miskin terutama pada perbedaan kemajuan teknologi. Jadi faktor-faktor kebudayaan sendiri hanya membantu mempercepat atau memperlambat perubahan kehidupan politik. Pengutamaan Duverger pada faktor teknologi sebagai pendorong pembangunan ekonomi tidak menjawab persoalan hubungan ketimpangan penguasaan teknologi dan kemiskinan suatu masyarakat. Apakah tingkat kemajuan dalam bidang teknologi menunjukkan masyarakatnya sejahtera?

Pada abad ke 19, Inggris merupakan negara yang memiliki teknologi dan industri sangat maju di dunia. Tapi kondisi buruhnya memprihatinkan. Banyak anak-anak dipekerjakan tanpa diberi upah, hanya ditampung di barak-barak kumuh dan diberi makan ala kadarnya. Kondisi perburuhan di Inggris menjadi fakta penting bagi argumentasi pemikiran Karl Marx.

Di era kemerdekaan, kemajuan teknologi sebagaimana tercermin dari perkembangan industri manufaktur, pertambangan, dan sebagainya, tidak membuat Indonesia beranjak dari sumber tenaga murah dan penjaja sumber daya alam. Kepentingan akumulasi modal yang terjadi tidak membuat rakyat tidak dipupuk oleh cita-cita untuk mengelola sumber daya alamnya secara maju. Pada akhirnya, para petani, nelayan, dan industri kecil masih bergantung pada keterampilan-keterampilan sederhana, serta pedagang kecil semakin terdesak sektor perdagangan modern. Sebagian besar penanaman modal asing (PMA) di Indonesia bersifat *footloose industry*, dengan lebih mempertimbangkan biaya produksi murah dan lokasi pabriknya mudah dipindahkan ke negara lain, seperti tekstil dan sepatu. Industrialisasi semacam itu tidak melakukan alih teknologi, sehingga buruh hanya dijadikan sebagai tukang atau operator mesin.

Jadi Duverger tidak melihat bahwa doktrin dan kebudayaan justru dapat dipandang memiliki peran menentukan kemajuan ekonomi dan akses teknologi. Doktrin dan kebudayaan, dalam hal

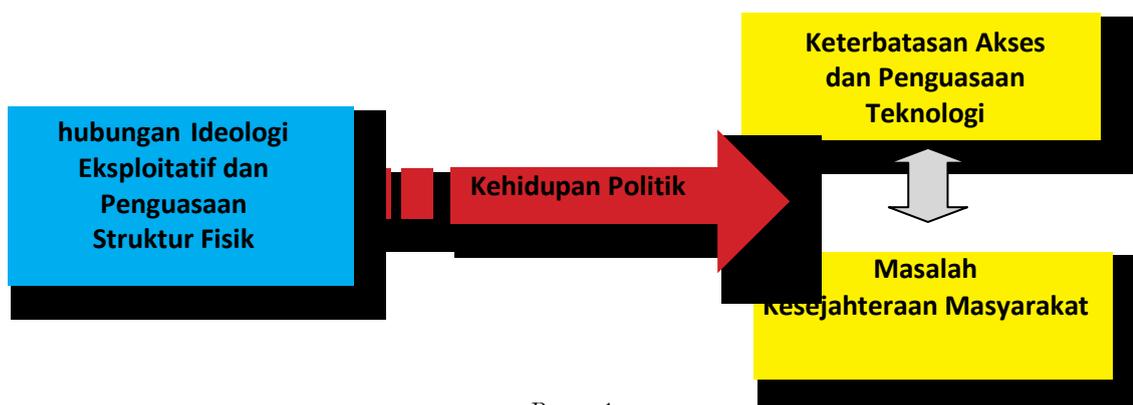
ini ideologi, jika berkaitan kepentingan akumulasi modal yang eksploitatif membuat suatu bangsa terus dilanda kemiskinan serta terjadi ketimpangan distribusi penguasaan dan peruntukan teknologi modern. Pengaruh ideologi eksploitatif di lembaga-lembaga politik membuat berbagai kebijakan yang dihasilkan memarginalisasi ekonomi sebagian besar masyarakat dan tidak adanya perubahan strategi industrialisasi.

Antonio Gramsci menyoroti bahwa ideologi bukan hanya sekadar refleksi dari realitas material, karena ideologi merupakan konsepsi kehidupan yang tampak pada segala aspek eksistensi individual dan kolektif. Ideologi “menggerakkan” massa manusia, dan menciptakan ruang bagi manusia untuk bergerak, memperoleh kesadaran atas posisi dan perjuangan mereka, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Gramsci melanjutkan, ideologi tiap kelas memiliki tujuan yang berbeda karena bagi kelas penguasa ideologi bertujuan mempertahankan kohesi sosial dan kepentingan dominan, adapun sikap perlawanan akibat eksploitasi ditunjukkan oleh kelas tertindas. Ia mengacu pada politik Machiavelli bahwa kelas berkuasa memperoleh dominasi bukan hanya dengan kekuatan dan paksaan, tetapi juga dengan menciptakan pihak-pihak yang “sukarela” mau dikuasai di mana ideologi adalah sesuatu yang penting untuk menciptakan “kerelaan” tersebut.<sup>13</sup>

Untuk itu, fenomena kekuasaan dalam negara-bangsa perlu dilihat dari hubungan antara ideologi eksploitatif dan penguasaan struktur fisik, khususnya menyangkut sumber daya alam dan sumber tenaga kerja yang melatari kehidupan politik, sehingga menentukan akses dan penguasaan teknologi modern serta tingkat kesejahteraan masyarakat. J

12. Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart, 1971, h. 327.  
13. *Ibid*, h. 125-136.



Bagan 1  
Pengaruh Kehidupan Politik yang Dilatarbelakangi  
Hubungan Antara Ideologi Eksploitatif dan Penguasaan Struktur Fisik

## 7. PEMBAHASAN

### 7.1. PERSOALAN MEMBANGUN KEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS

Setelah Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia, tujuan kemerdekaan Indonesia dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Keinginan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan antitesa dari kolonialisme yang melakukan pemiskinan, pembodohan, penindasan, dan ketidakadilan, sehingga apa yang ingin dicapai dari kehidupan kebangsaan yang bebas itu adalah:

“...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Artinya, kehidupan kebangsaan yang bebas adalah bebas dari (freedom from) pemiskinan, pembodohan, dan penindasan, sekaligus bebas untuk (freedom for) menggapai keadilan dan kemakmuran yang merata. Hal itu menggambarkan usaha nasional menghadapi operasionalisasi ideologi eksploitatif.

Nilai yang menjadi dasar dari kehidupan kebangsaan yang bebas adalah Pancasila. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup (*philosophische grondslag*) bagi Indonesia merdeka. *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi semboyan ikatan persatuan keanekaragaman bangsa diambil dari kitab zaman Majapahit.

Indonesia menghadapi kenyataan bahwa kolonial Belanda mewarisi kondisi kemasyarakatan bersifat majemuk yang tidak memiliki batas ekonomi, politik, dan sosial budaya sama, tapi hanya disatukan oleh persamaan nasib dengan wilayah dan penduduknya berdasarkan warisan kolonial. “Persamaan nasib” itu sendiri memiliki pengalaman dan pemahaman berbeda-beda di antara kelas sosial (antara priyayi dan lapisan sosial atas lain dengan rakyat jelata) serta antar daerah. Gagasan kesadaran nasional sendiri belum menyebar secara merata ke seluruh tanah air karena masih mengandalkan tokoh-tokoh lokal pro kemerdekaan yang belum tentu tersedia di tengah keterbatasan teknologi.

Di Indonesia berkembang berbagai aliran politik, yang merupakan cermin akumulasi, akulturasi, dan

asimilasi kultural di Nusantara sejak masa pra-kolonial dan mengkrystal sejak zaman kolonial melalui pendirian sejumlah organisasi modern sejak awal abad ke 20. Pasca kehadiran Belanda sebagai musuh bersama dari bumi Indonesia, belum terdapat sistem ideologi yang secara praktis dapat mempertalikan berbagai golongan. Indonesia pascakolonial belum menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai bersama dihormati warga negara pada umumnya.

Pada era 1950-an, partai politik merupakan pusat aktivitas politik terpenting dan eksekutif merupakan kepanjangan tangan partai politik. Isu keadilan sosial seharusnya bisa dielaborasi oleh partai-partai sambil menyelesaikan persoalan ideologi formal. Tapi konflik ideologi dan politik yang berlarut-larut justru menyebabkan kerjasama politik yang berlangsung lebih berorientasi jangka pendek. Energi menjadi terkuras sehingga kerangka kerja bersama antar partai dari berbagai aliran politik untuk membela kepentingan rakyat kecil belum dibangun, seperti usaha memprioritaskan pembangunan koperasi desa untuk memulihkan perekonomian desa yang pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang dieksploitasi atau pemberdayaan sektor kelautan yang mengalami marginalisasi sejak VOC menguasai jalur perdagangan laut.

Pada era Demokrasi Liberal, organisasi politik yang sudah dikenal oleh masyarakat desa di Jawa sejak kolonial, yang ditandai dengan masuknya Sarikat Islam ke daerah perkebunan di Jawa Tengah, melakukan usaha meletakkan dasar-dasar pendidikan dan kelembagaan politik di desa-desa. Penduduk desa dapat menyalurkan aspirasinya melalui partai-partai politik yang diyakininya. Tapi konflik sosial dan politik terjadi di tingkat akar rumput, di mana sebuah desa sering bentrok dengan desa lain karena perbedaan aliran politik yang mencapai puncaknya pada paruh pertama 1960-an.

Para elite partai-partai politik menjanjikan cita-cita berdasarkan aliran politik masing-masing agar tercipta “kerelaan” rakyat kecil untuk mendukungnya, tapi mereka belum terbukti memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian di masyarakat pedesaan. Faktor ini lalu dijadikan dasar legitimasi bagi pemerintah Orde Baru untuk menerapkan konsep massa mengambang (*floating mass*) yang melarang aktivitas politik di bawah tingkat Kabupaten.

Kesejahteraan penduduk Indonesia pasca penyerahan kedaulatan tahun 1949 sesungguhnya merosot jauh. Pada tahun 1951 pendapatan per kapita orang Indonesia hanya 28,3 gulden, lebih rendah ketimbang zaman Melaise (1930) yang mencapai 30 gulden.

Retorika “ekonomi nasional” yang didengungkan

para pemimpin politik ternyata dalam praktik mulai mendorong penguasaan sumber-sumber ekonomi di antara para pemimpin partai politik dan kalangan dekatnya. Adapun koperasi tidak berkembang menjadi organisasi selfhelp dan otoaktivitas, sehingga koperasi pertanian atau pedagang kecil, misalnya, dimasuki orang-orang yang bukan petani dan pedagang kecil. Pengurus koperasi ditentukan dari atas sehingga menjadi kepanjangan tangan kepentingan kelas atas. Koperasi tidak menjadi sokoguru ekonomi nasional yang tumbuh dari bawah, sebagaimana gagasan Mohamaad Hatta, sehingga masih jauh dari harapan menghadapi kekuatan pemodal besar dari dalam dan luar negeri.

Adapun usaha pengoreksian ketimpangan penguasaan tanah melalui reforma agraria (land reform) dilakukan secara bertahap, yakni dari awal kemerdekaan hingga akhir 1950-an masih bersifat sektoral dan mencakup daerah tertentu saja. Pada tahun 1946 tanah-tanah desa perdikan dihapus. Kemudian Kabinet Hatta membentuk panitia penyelidikan hak konversi tanah yang menelurkan UU No. 13 tahun 1948 untuk menghapus hak tersebut di kesultanan Yogyakarta dan Surakarta sehingga usaha land reform berhasil mengambillah tanah milik perusahaan Belanda di daerah tersebut. Selanjut, dalam pelaksanaan UU No. 1 tahun 1958 yang menghapus secara resmi semua tanah-tanah partikelir atau dikenal sebagai tindakan nasionalisasi perusahaan asing, banyak hasil nasionalisasi dikuasai badan usaha negara dan militer. Ketika pemerintahan Soekarno melakukan konsolidasi kekuasaan melalui pemberlakuan Dekrit Presiden 1959, reforma agraria menjadi usaha merombak struktur penguasaan tanah lintas sektoral secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kondisi historis-material masyarakat di Nusantara memiliki kekhasannya. Ketika zaman feodal tanah-tanah di Eropa dikavling para baron, tanah komunal menghidupi rakyat kecil di sini.

Kolonialisme merusak kepunyaan masyarakat. Setelah VOC memonopoli perdagangan hasil-hasil bumi, masa pemerintahan Herman Willem Daendles (1800-1811) melakukan sedikit perubahan struktur penguasaan tanah yang menimbulkan tanah partikelir, era Thomas Stamford Rafles (1811-1816) memberlakukan pajak tanah, dan cultuurstelsel (1830-1870) mengeksploitasi sumber daya tanah dengan cara-cara terpimpin, maka tahun 1870 menjadi awal perombakan besar-besaran struktur penguasaan tanah melalui pelaksanaan Agrarische Wet.

Kebijakan itu didorong pembukaan Terusan Suez

setahun sebelumnya dan berkembangnya penggunaan kapal uap hasil Revolusi Industri yang membuat lalu lintas perdagangan Eropa-Asia lebih cepat sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa perlu memfasilitasi kedatangan para pemodal besar.

Setelah pemberlakuan Agrarische Wet tahun 1870, penguasaan tanah swasta asing melonjak di Hindia Belanda dari 25 ribu hektar (1870) menjadi 435 ribu hektar (1901). Pada tahun 1929 tanah yang disewakan kepada swasta asing mencapai 3,946 juta dimana 1,166 juta ha diantaranya ditanami tanaman ekspor atau sekitar sepertiga luas sawah di Jawa (3,372 juta ha) pada masa yang sama bagi puluhan juta kaum petani. Investasi perkebunan banyak memperoleh buruh murah dari para petani yang kehilangan tanah. Pada 1932 tanah komunal di Jawa dan Madura tinggal 13%.

Hasil perombakan penguasaan tanah dinikmati kolonial Belanda dan kaum pemodal besar. MC Ricklefs memaparkan, antara tahun 1900 hingga 1930 produksi gula naik hampir empat kali, teh naik hampir sebelas kali, demikian pula terjadi kenaikan cukup berarti pada lada, kopi, kopra, dan produksi lainnya. Sekitar 70 persen modal Belanda diinvestasikan di Pulau Jawa, setengahnya di bidang pergulaan. Adapun di luar Jawa perusahaan non Belanda banyak beroperasi di sektor agrikultur dan pertambangan. Investasi itu memperoleh banyak buruh murah justru dari para petani yang kehilangan tanah.

UUPA tahun 1960 bermaksud merestrukturisasi penguasaan tanah melalui pembagian dan perlindungan hak tanah kaum tani, serta pembatasan kepemilikan tanah maksimal 5 hektar. Namun usaha ini dihambat para pemilik tanah besar serta birokrat korup dan pro tuan tanah. Pelaksanaan reforma agraria kemudian ditandai Aksi Sepihak BTI/PKI, sehingga reforma agraria disalahpahami sebagai gerakan komunis dan kekuatan politik yang kuatir dengan perkembangan PKI mulai memperlambat agenda populis tersebut. Padahal, komunisme tidak mengakui hak milik- prinsip yang masih diakomodir UU tersebut.

Pada era Orde Baru, usaha reforma agraria dihentikan. Meski tidak dicabut, keberadaan UUPA tahun 1960 diperlemah. Pengesahan UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 membuat modal asing mengalir tapi rakyat tidak dipupuk oleh cita-cita untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Meski terdapat program transmigrasi, hal tersebut hanya berupa pemindahan penduduk (restlement) dengan pemberian tanah bagi para transmigran tapi tidak merupakan bagian dari usaha mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah karena pada saat bersamaan Orde Baru mendorong

pembangunan besar-besaran sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, serta pembangunan kawasan industri oleh pengusaha nasional dan asing, sehingga penguasaan tanah justru semakin timpang.

Hak-hak adat/komunal diabaikan serta semakin banyak petani dan golongan adat kehilangan tanahnya. Secara nasional, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat paling sedikit 10,89 juta hektar sengketa lahan dengan mengorbankan setidaknya 1,19 juta KK di 286 Kabupaten/Kota sepanjang 1970-2001.

Koperasi juga tidak didorong menjadi sokoguru ekonomi Indonesia sehingga struktur penguasaan modal juga kian timpang dan terpusat di kota-kota besar. Dengan angkatan kerja berpendidikan rendah, urbanisasi selalu menambah kaum miskin perkotaan. Peluang sektor informal perkotaan dibatasi melalui tindak penggusuran. Kehilangan penguasaan tanah di pedesaan lalu mendorong proletarianisasi yang terjebak lingkaran kemiskinan: menjadi buruh karena miskin dan terus miskin karena menjadi buruh. Semakin banyak buruh tani di sektor pertanian dan kaum pendatang yang bekerja sebagai buruh outsourcing di industri manufaktur.

Menurut Nasikun, yang bekerja di belakang konflik pertanahan dekade 1980-an dan awal 1990-an adalah terjadinya pergeseran struktur ekonomi kita yang telah menempatkan sektor pertanian di daerah pedesaan semakin menjadi suatu usaha ekonomi yang semakin dikuasai oleh mereka yang berada di luar sektor pertanian, dan yang sebaliknya telah menjadikannya sebagai usaha ekonomi yang semakin jauh berada di luar jangkauan kontrol masyarakat pertanian di daerah pedesaan dan di dalam skala yang semakin tidak mendukung nilai-nilai sosial yang luas.

Sebagian besar rakyat bekerja di sektor pertanian sehingga pemiskinan kaum tani berdampak luas pada perekonomian rakyat. Terdesaknya kaum tani dari sumber kehidupannya menjadikan negeri luas dan kaya ini sebagai pemasok buruh rendah dan pembantu rumah tangga. Dengan angkatan kerja berpendidikan rendah, arus urbanisasi selalu menambah kaum miskin perkotaan.

Kemerosotan tajam penerimaan pemerintah dari minyak bumi yang dimulai tahun 1982 membuat pemerintah sejak tahun 1983 mulai mencari cara-cara lain untuk menggerakkan pembangunan melalui serangkaian langkah deregulasi yang berorientasi pasar. Tapi industri asing yang membuka pabriknya di Indonesia tidak membuat negeri ini melakukan lompatan industrialisasi ke industri high-tech atau tidak mendorong alih teknologi, melainkan memanfaatkan buruh murah untuk melakukan pekerjaan massal secara terpola dalam

rangka memenuhi permintaan pasar dunia. Dengan karakter tersebut, posisi buruh menjadi rentan karena ketika gerakan buruh semakin kuat serta terjadi tuntutan kenaikan kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja, maka investasi itu dipandang kurang kondusif sehingga ordernya dipindahkan ke tempat lain, yang mengakibatkan para buruh di pabrik bersangkutan mengalami pemutusan hubungan kerja.

Upah buruh yang murah dijadikan faktor penarik bagi investor untuk menanam modal di sini. Di masa Orde Baru, kaum buruh dibatasi hak-haknya berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Aparat militer dan polisi dilibatkan untuk mengintimidasi kaum buruh.

Sejak dekade 1980-an hingga kini pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) mulai berlangsung secara massal. Negeri luas dan kaya ini menjadi pemasok buruh rendah dan pembantu rumah tangga. Di Malaysia posisi sosial-ekonomi pekerja Indonesia melahirkan julukan "indon" yang konotasinya sederajat istilah "inlander" pada zaman kolonial. Mayoritas dari sekitar 7 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi buruh kasar dan pekerja rumah tangga tanpa kemampuan memadai (unskilled) .

Tumbangnya kekuasaan Soeharto 1998 memang mengakhiri kekuasaan sentralistik Orde Baru. Namun, demokratisasi politik belum merombak struktur penguasaan sumber-sumber ekonomi yang timpang, termasuk tanah sebagai sumber ekonomi yang vital.

Belakangan media massa nasional menyoroti masalah pemiskinan petani, terutama akibat mayoritas penguasaan lahan petani hanya di bawah 0,5 hektar dan jumlah petani yang berubah menjadi buruh tani kian banyak karena tidak lagi memiliki lahan sendiri. Banyak lahan pertanian pindah ke tangan kaum pemodal. Para baron modern tumbuh subur, satu perusahaan konglomerasi bisa menguasai tanah ratusan ribu hektar.

Program pemerintah sekarang menggenjot pertumbuhan sektor pertanian juga tidak banyak dinikmati petani kecil. Pemerintah justru gencar menarik investasi skala besar pertanian dalam program "food estate" di Merauke yang mengancam hak adat setempat. Kasus pertanahan di Mesuji dan Bima merupakan puncak gunung kegagalan reforma agraria.

## **7.2. MENGUATNYA JALINAN RELASI POLITIK dan penGuaSaan SuMber-SuMber EKONOMI**

Ketika konsolidasi perjuangan nasional di bawah pemerintahan Soekarno belum mencapai hasil

optimal meningkatkan derajat rakyat kecil, terjadi perubahan kepemimpinan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan itu tidak hanya perubahan kepemimpinan politik melainkan terjadi perbedaan signifikan secara filosofis dengan menguatnya jalinan relasi politik dan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Restrukturisasi politik diawali konsolidasi militer dan penguatan Golongan Karya (Golkar) –yang tidak mau disebut sebagai partai politik- sebagai kekuatan utama Orde Baru yang terpusat pada Soeharto. Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki monoloyalitas bagi kepentingan kemenangan Golkar dalam pemilu.

Negara birokratik otoriter Orde Baru menginginkan pembatasan peran partai politik (organisasi sosial-politik di luar Golkar) dalam memperoleh dukungan dari rakyat dan keterlibatannya pada proses pengambilan kebijakan pemerintahan. Secara struktural, pemerintah menerapkan konsep massa mengambang (*floating mass*), sehingga semua organisasi politik hanya memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat Kota/Kabupaten. Tapi Golkar diuntungkan melalui jaringan birokrasi dan militer hingga ke desa-desa. Adapun dukungan partai politik dari rakyat tidak dapat diperoleh dengan mudah karena selain adanya usaha sistematis dari penguasa untuk memenangkan Golkar, rakyat juga tidak dapat mengorganisir diri dan melihat partai ini tidak memiliki peranan yang kuat untuk memberdayakan mereka.

Represi Orde Baru menolak keberadaan oposisi sehingga kontrol terhadap jalannya pemerintahan diperlemah. Kategori ekstrem kiri dan ekstrem kanan diciptakan untuk menjamin stabilitas. Usaha mengatasi konflik ideologi diterjemahkan dengan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Ruang untuk menafsirkan Pancasila ditiadakan, kecuali tafsiran resmi dari pihak penguasa. Pancasila pun semakin kering karena hanya dijadikan wacana politik, sehingga berdampak pada era reformasi di mana praktik politik menjadi lebih bersifat pragmatis ketimbang perwujudan landasan ideologis.

Bangunan politik Orde Baru itu menopang penciptaan penguasaan ekonomi di sekitar lingkaran pusat politik. Partai-partai politik dan pihak lain di luar pusat kekuasaan kehilangan sumber-sumber ekonomi dan para pengusaha besar menjaga jarak dengan mereka. Booming minyak bumi pada era 1970-an dijadikan sumber ekonomi pula bagi para aktor politik Orde Baru. Konglomerasi juga mulai terbangun menguasai sektor hulu hingga hilir. Kesenjangan sosial-ekonomi ini menimbulkan sentimen rasial karena sejumlah konglomerat yang memperoleh fasilitas istimewa berasal dari kalangan Tionghoa.

Pembangunan yang terpusat dan timpang juga

mengundang permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat di sejumlah daerah. Struktur negara dalam pengaturan ekonomi tidak memperhatikan kondisi politik, ekonomi, dan budaya lokal. Hal itu mendorong berkembangnya separatisme yang lalu ditangani melalui cara-cara militeristik tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Kekerasan struktural secara sistematis menyumbat akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi dan politik, sehingga justru menyuburkan separatisme. Pendekatan militeristik juga lebih dikedepankan terhadap aksi-aksi kaum tani dan buruh.

Persatuan nasional dan modernisasi dijalankan dengan mengabaikan ketimpangan relasi sosial di dalamnya. Penguasa Orde Baru membawa Indonesia masuk ke dalam jaringan kapitalisme global tanpa memiliki politik-ekonomi untuk membangun kemandirian ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sejak 1998, demokratisasi tidak dapat dibendung. Tapi bersamaan dengan itu isu nasionalisme menjadi tenggelam. Dengan ketimpangan penguasaan sumber-sumber daya di bidang ekonomi, kekuasaan politik lebih didominasi oleh kalangan atas. Di bidang sosial-budaya, perbedaan akses untuk mengikuti pendidikan semakin melebar dengan semakin mahalnya biaya pendidikan. Tanpa bingkai nasionalitas, ketika rakyat semakin bebas menyuarakan aspirasi politiknya maka isu agama, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, kelas atas-bawah, dan pusat-daerah dapat mengganggu integrasi bangsa dan kehidupan rakyat di dalamnya. Prioritas tuntutan daerah untuk otonomi hingga merdeka di era reformasi merupakan reaksi balik praktik sentralisme kekuasaan Orde Baru.

Sebagai dampak deideologisasi zaman Orde Baru, Indonesia pasca Orde Baru justru semakin mengukuhkan pragmatisme politik. Pergantian kekuasaan politik dari Soeharto ke BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Soesilo Bambang Yudhoyono cenderung hanya merupakan rotasi kekuasaan dalam rangka demokratisasi politik. Meski terjadi pergeseran aktor dari militer ke sipil dan pemusatan kekuasaan menyebar ke daerah-daerah, tapi rakyat kecil belum mampu mentransformasi sumber dayanya menjadi kekuatan politik, sehingga para aktor politik yang dilahirkan cenderung mempertahankan kekuasaan kelas dominan.

Praktik politik tanpa ideologi dijalankan di mana pertarungan kekuasaan hanya melahirkan para pemimpin-pemimpin baru yang lebih berorientasi pada kekuasaan serta sumber-sumber ekonomi bagi diri dan kelompoknya. Pencarian sumber-sumber ekonomi itu melestarikan operasionalisasi

ideologi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja murah.

Rakyat terus dipisahkan dari sumber daya alamnya dan hak-hak adat masih diabaikan, sehingga penguasaan tanah semakin timpang. Indonesia semakin terbuka terhadap liberalisasi ekonomi tanpa dibangun politik ekonomi yang menjamin kedaulatan bangsa dan kehidupan rakyat di dalamnya. Modernisasi dan globalisasi berjalan di tengah ketimpangan relasi sosial di dalamnya. Indonesia terus terjerat menjadi penjaja sumber daya alam, sumber tenaga kerja murah, dan target pasar.

Struktur yang eksploitatif membuat sebagian besar rakyat sulit melakukan mobilitas vertikal. Jalinan relasi politik dan modal yang terbentuk juga menyuburkan korupsi dan manipulasi. Akhirnya, ruang penghubung, perajut dan pemakna kesadaran bersama sebagai satu bangsa menjadi sempit sehingga tanpa bingkai nasionalitas, bentrok antarwarga, gesekan antarsuku dan umat beragama, hingga persoalan separatisme dan terorisme kerap menjadi berita.

## 8. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai negeri pascakolonial, secara konseptual, nasionalisme Indonesia yang digagas para pendiri bangsa, terutama Soekarno dan Mohammad Hatta, mampu berbicara atasnama kepentingan bangsa dan rakyatnya dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalamnya. Nasionalisme ini mampu mengadopsi dan mengoreksi paham-paham dari luar, terutama nasionalisme dari Barat, sosialisme, dan teori kedaulatan rakyat, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga tidak “ditawan” oleh kategori dari luar, seperti modernitas dan kemajuan, yang menindas rakyat kecil. Sebaliknya kategori-kategori dari luar itu justru berada dalam kerangka pembebasan rakyat kecil. Negara dituntut memiliki politik-ekonomi yang berpegang pada dua nilai dasar nasionalisme bagi rakyat kecil: kedaulatan bangsa dan penghidupan rakyat di dalamnya, agar tidak terbawa irama reorganisasi struktur kapitalisme global.

Di sini nasionalisme Timur dan nasionalisme Barat tidak harus dipertentangkan karena ada aspek-aspek partikular di dunia Timur dan aspek-aspek universal dari pemikiran Barat yang bersifat eklektis. Secara universal, nasionalisme lahir pada masa Pencerahan dan Revolusi Perancis sehingga menegaskan kedaulatan bangsa dan melampaui identitas primordial, serta keberadaan hak-hak dasar dengan landasan kemanusiaan bersama. Tapi secara partikular, nasionalisme Timur, khususnya di negeri pascakolonial Indonesia, disesuaikan dengan kondisi setempat dan dijalankan untuk mengatasi

ideologi eksploitatif. Kehidupan kebangsaan yang bebas, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, memerlukan kekuatan korelasi antara nasionalisme dan keadilan sosial, sebagai usaha bangsa merombak ketimpangan penguasaan sumber-sumber ekonomi di tengah masyarakat yang bineka

Pemerintahan yang bersih dan efisien merupakan keharusan. Pengoreksian penguasaan sumber-sumber ekonomi yang adil dilakukan, mulai reforma agraria, pemerataan infrastruktur, penataan jaringan perdagangan, prioritas kredit bagi berbagai profesi rakyat (petani, nelayan, usaha kecil, dan koperasi), hingga pemerataan akses pendidikan berkualitas. Industrialisasi yang dikembangkan berorientasi pada penguasaan teknologi tinggi dengan mensyaratkan penanam modal melakukan alih teknologi. Penghormatan terhadap hak-hak adat, termasuk hak atas sumber daya ekonomi, harus ditegakkan. Peninjauan ulang kontrak juga dijalankan di sektor pertambangan yang banyak merugikan negara dan memarjinalkan masyarakat setempat.

Kegagalan nasionalisme mengelaborasi persoalan keadilan sosial ke arah kerja-kerja konkrit membuat keberlanjutan kehidupan bersama dalam bangsa yang bineka ini menjadi mengkhawatirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Adams, Ian (2004). *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Qalam.
2. Anderson, Benedict (1998). *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*. London: Verso.
3. Anderson, Benedict (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
4. Burger, DH (1957). *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia (Djilid Pertama)*, Djakarta: JB Wolters.
5. Duverger, Maurice (2000). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
6. Giddens, Anthony dan David Held (eds) (1987). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, Jakarta: CV Rajawali.
7. Gramsci, Antonio (1995). *Selections from the Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart.
8. Hatta, Mohammad (2000). *Karya Lengkap Bung Hatta (Buku 2): Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES.
9. Kaligis, Retor AW (2003). *Hubungan Antara*

Kemiskinan, Persyaratan Kondisional, dan Tingkat Konflik Serta Strategi Peningkatan Produktivitas Buruh Pada Industri Sepatu “Nike” di PT Doson Indonesia dan PT Prata-ma Abadi Industri, Kabupaten Tangerang, tesis Program Magister Pembangunan Sosial, Sosiologi, FISIP-Universitas Indonesia.

10. Lindblad, J. Thomas (ed) (2002). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
11. Loomba, Ania (1998). *Colonialism/Postcolonialism*, London: Routledge.
12. Ricklefs, MC (1993). *A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (Second Edition)*, Hongkong: The MacMilland Press Ltd.
13. Roth, G. and C. Wittich (eds) (1968). *Max Weber: Economy and Society*, New York: Bedminster Press.
14. Sakirman, Ir, “Tentang Ekonomi dan Keuangan”, *Buletin Ekonomi dan Masyarakat* No. 1 tahun 1959.
15. Simbolon, Parakriti T (1995). *Menjadi Indonesia: Akar-Akar Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Kompas-Grasindo.
16. Suhendar, Endang dan Ihdhal Kasim (1996). *Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, Jakarta: EL-SAM.
17. Sukarno (1984). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Indayu Press.
18. Soekarno (1964). *Dibawah Bendera Revolusi (Jilid Pertama)*, Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
19. Soekarno (1947). *Lahirnya Pantja-Sila*, Jogjakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer.
20. Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi (ed) (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

#### **BIOGRAFI PENULIS :**

**Retor AW Kaligis;** Lahir di Jakarta, 13 Oktober 1970. Sekarang menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah *INSANI*, STISIP Widuri, Jakarta. Menyelesaikan S1 Jurnalistik, FIKOM, Universitas Padjadjaran (1994), S2 Sosiologi, Manajemen Pembangunan Sosial-FISIP, Universitas Indonesia (2003), dan S3 Sosiologi-FISIP, Universitas Indonesia (2010). Ia juga aktif sebagai Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara, organisasi kajian yang menggali akar sosio-historis Nusantara untuk membahas fenomena kemasyarakatan aktual di Indonesia. Tulisannya tersebar di sejumlah media nasional seperti *Harian Kompas*, *Suara*

*Pembaruan*, *Harian Media Indonesia*, dan *Harian Sinar Harapan*.

Catatan:

Pokok-pokok artikel ini merupakan merupakan bagian dari disertasi penulis di Program S3 Sosiologi FISIP, Universitas Indonesia berjudul “Nasionalisme Bagi Rakyat Kecil: Studi Komparatif Ideologi dan Praktik Nasionalisme Pada Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan PDI Perjuangan di Masa Kemerdekaan”